



diskominfo
Kabupaten Bandung

KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANDUNG KAJIAN PILAR TERPILIH



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Batasan Masalah	8
BAB II DATA DAN METODOLOGI.....	9
2.1. Data Penelitian	10
2.2. Metodologi	13
2.2.1 Klasterisasi untuk Pemetaan Produktivitas Padi	13
2.2.2 Tingkat Pemenuhan Cadangan Pangan	18
2.2.3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	18
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
3.1. Pendahuluan	20
3.2. Hasil Klasterisasi Produktivitas Padi.....	20
3.3. Tinjauan Tingkat Pemenuhan Cadangan Pangan	24
3.4. Tinjauan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	25
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Panen dan Produktivitas Padi di 38 provinsi	10
Tabel 2. Kondisi Cadangan Pangan Kabupaten Bandung	11
Tabel 3. Produksi (ton), Produktivitas (ku/ha), dan Skor PPH kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2024	12
Tabel 4. Skor PPH Kabupaten Bandung Periode 2021-2024	13
Tabel 5. Tingkat Pemenuhan Cadangan Pangan Kabupaten Bandung	24

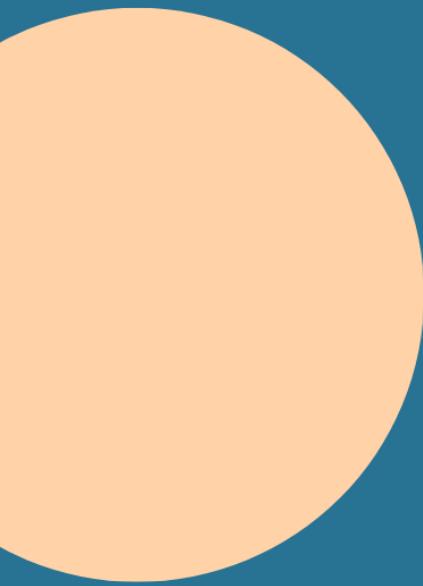
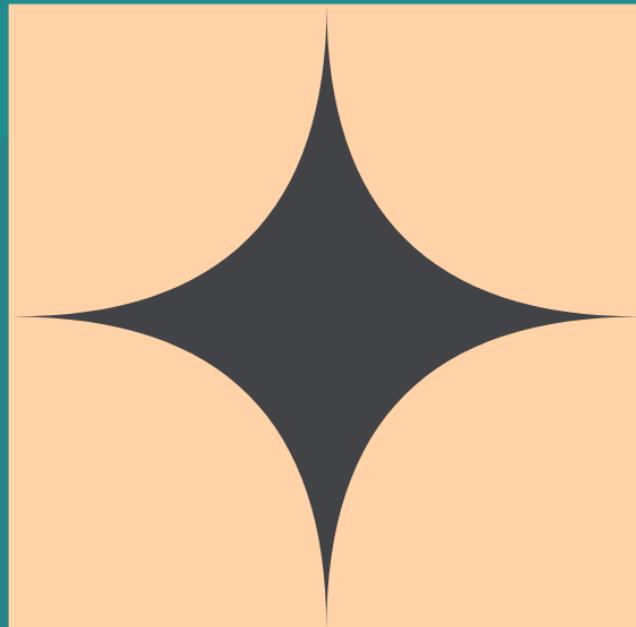
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Klaster Optimal menggunakan metode Silhouette.....21

Gambar 2. Visualisasi Hasil Klasterisasi menggunakan K-Means22

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pola konsumsi masyarakat Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada beras sebagai pangan pokok utama dengan sebagian besar masyarakat masih memegang prinsip *“Belum makan kalau makannya bukan dengan nasi”*. Kebiasaan ini menjadikan Indonesia dengan penduduk sebanyak 283,49 juta jiwa menempati peringkat keempat sebagai negara dengan konsumsi beras global terbesar tahun 2024 sebesar 36,6 juta metrik ton. Sebagai salah satu lumbung padi Jawa Barat, Kabupaten Bandung memiliki andil dalam mendukung ketersediaan beras di tingkat regional maupun nasional. Namun demikian, produksi dan produktivitas padi saja belum sepenuhnya menjamin tercapainya ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan, tantangan ketahanan pangan menjadi semakin krusial, termasuk di tingkat daerah seperti Kabupaten Bandung. Mengacu pada Indeks Ketahanan Pangan Badan Pangan Nasional (2022), kerangka analisis dalam kajian ini dibangun berdasarkan tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Pilar ketersediaan mencakup produksi pangan domestik, stok atau cadangan pangan,

serta kegiatan ekspor dan impor. Pilar keterjangkauan meliputi aspek distribusi, stabilisasi pasokan dan harga, sistem logistik, manajemen stok, daya beli masyarakat, serta akses terhadap pasar dan informasi. Adapun pilar pemanfaatan mencakup perbaikan pola konsumsi, penganekaragaman konsumsi pangan, perbaikan gizi, serta keamanan dan mutu pangan. Dalam analisis ini, fokus diarahkan pada tiga indikator utama. Pertama, produksi padi digunakan sebagai indikator ketersediaan karena beras masih menjadi pangan pokok utama masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung. Kedua, cadangan pangan rumah tangga dianalisis sebagai bagian dari stok pangan. Ketiga, Pola Pangan Harapan (PPH) digunakan untuk menilai aspek pemanfaatan melalui kualitas dan keragaman konsumsi pangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam laporan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi produktivitas padi dan luas panen dalam menggambarkan produksi padi di Kabupaten Bandung sebagai bagian dari ketersediaan pangan?
2. Bagaimana cadangan pangan rumah tangga di Kabupaten Bandung mencerminkan ketahanan pangan masyarakat?
3. Bagaimana pola konsumsi masyarakat yang tercermin melalui Pola Pangan Harapan (PPH)?
4. Sejauh mana ketiga aspek tersebut menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari kajian ini adalah:

1. Menganalisis produktivitas padi dan luas panen dalam menggambarkan produksi padi di Kabupaten Bandung sebagai bagian dari ketersediaan pangan.
2. Mengidentifikasi kondisi cadangan pangan rumah tangga di Kabupaten Bandung.
3. Menggambarkan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Bandung melalui indikator Pola Pangan Harapan (PPH).
4. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketahanan pangan Kabupaten Bandung berdasarkan indikator ketersediaan, cadangan pangan, dan pola konsumsi.

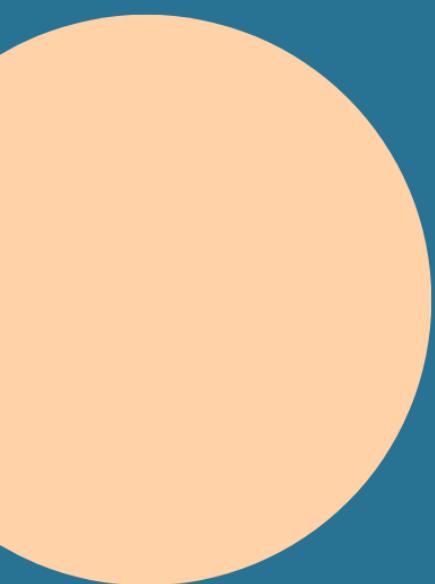
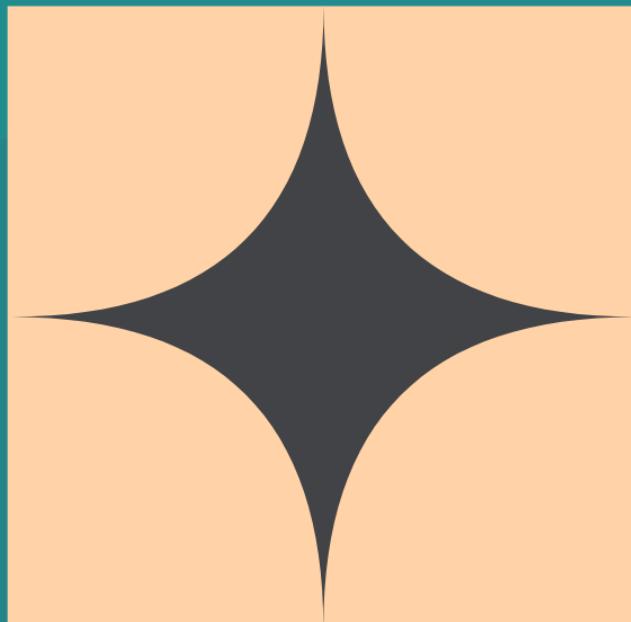
1.4 Batasan Masalah

Kajian ini dibatasi pada periode tahun 2021–2024 dan hanya menyoroti beberapa pilar ketahanan pangan, yaitu Produktivitas Padi dan Luas Panen, Cadangan Pangan Rumah Tangga, dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sementara itu, aspek pendukung lainnya belum dibahas pada bagian ini namun tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan secara menyeluruh.

BAB II

DATA DAN

METODOLOGI



2.1. Data Penelitian

Dalam kajian ini digunakan data sekunder yang terbagi ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, data luas panen dan produktivitas padi di 38 provinsi Indonesia pada tahun 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Luas Panen dan Produktivitas Padi di 38 provinsi

Provinsi	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)
Aceh	301.196,35	55,11
Sumatera Utara	419.463,48	52,56
Sumatera Barat	295.278,98	45,94
Riau	56.421,96	39,36
Jambi	61.625,68	45,60
Sumatera Selatan	521.092,21	55,83
Bengkulu	55.775,09	48,92
Lampung	531.715,12	52,50
Kep. Bangka Belitung	18.202,56	42,57
Kep. Riau	113,33	26,92
Dki Jakarta	498,31	46,29
Jawa Barat	1.475.362,09	58,47
Jawa Tengah	1.554.777,14	57,19
Di Yogyakarta	96.976,13	46,70
Jawa Timur	1.616.985,05	57,33
Banten	299.090,79	51,84
Bali	103.803,93	61,22
Nusa Tenggara Barat	281.717,84	51,59
Nusa Tenggara Timur	168.727,24	41,95
Kalimantan Barat	247.207,72	30,94
Kalimantan Tengah	111.016,13	32,98
Kalimantan Selatan	246.112,42	41,83
Kalimantan Timur	63.041,65	39,60
Kalimantan Utara	8.282,06	36,32
Sulawesi Utara	59.121,96	46,20
Sulawesi Tengah	172.606,22	44,14
Sulawesi Selatan	951.308,60	50,65
Sulawesi Tenggara	129.999,61	42,76

Provinsi	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)
Gorontalo	46.952,15	50,02
Sulawesi Barat	63.181,59	50,47
Maluku	23.947,35	38,05
Maluku Utara	9.366,71	33,34
Papua Barat	5.121,13	40,48
Papua Barat Daya	363,87	27,17
Papua	1.068,57	43,14
Papua Selatan	47.168,57	46,17
Papua Tengah	1.436,12	42,28
Papua Pegunungan	9,66	43,87

Kedua, data cadangan pangan rumah tangga yang mencakup cadangan pangan seharusnya dan cadangan pangan aktual di Kabupaten Bandung untuk periode 2021-2024 yang diperoleh melalui Portal Satu Data Kabupaten Bandung sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Kondisi Cadangan Pangan Kabupaten Bandung

Tahun	Cadangan Pangan Seharusnya (Ton)	Cadangan Pangan Aktual (Ton)
2021	1.416	177,61
2022	1.431	368,76
2023	1.432,97	812,08
2024	1.758,86	1.069,181

Ketiga, data skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang digunakan terdiri atas dua jenis. Pertama, data skor Pola Pangan Harapan (PPH) kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Produksi (ton), Produktivitas (ku/ha), dan Skor PPH kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2024

Wilayah	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)	PPH
Bandung	333,39	0,063715241	85,1
Bandung Barat	153,45	0,054583289	87,88
Bekasi	417,5	0,048995447	88,16
Bogor	295,09	0,059002659	87,12
Ciamis	232,13	0,052541874	95,1
Cianjur	615,43	0,058523203	91,83
Cirebon	505,72	0,059834359	94
Garut	449,45	0,061967462	91,54
Indramayu	1344883	63,34912881	95,79
Karawang	1045879	58,07438379	92,32
Kota Bandung	6,67	0,068904959	91,04
Kota Banjar	25,65	0,053661088	95,32
Kota Bekasi	1,49	0,053024911	91,53
Kota Bogor	143	51,07142857	85,91
Kota Cimahi	416	58,5915493	90,29
Kota Cirebon	585	58,5	92,58
Kota Depok	31	51,66666667	89,88
Kota Sukabumi	13,77	0,059327876	91,91
Kota Tasikmalaya	35,13	0,05296246	93,68
Kuningan	216,82	0,052573895	92,57
Majalengka	482,92	0,055499753	94,33
Pangandaran	124,85	0,051034173	94,93
Purwakarta	171,77	0,05711958	88,1
Subang	961,83	0,059231821	92,55
Sukabumi	455,58	0,056691679	90,44
Sumedang	263,88	0,053881651	92,49
Tasikmalaya	360,22	0,054187162	88,45

Kedua, data skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bandung periode 2021-2024 yang diperoleh dari Portal Satu Data Kabupaten Bandung sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 4.**

Tabel 4. Skor PPH Kabupaten Bandung Periode 2021-2024

Tahun	Skor PPH
2021	81,1
2022	82,2
2023	85,6
2024	85,1

2.2. Metodologi

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dan analisis multivariat. Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data berupa angka dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi. Analisis deskriptif kuantitatif umumnya meliputi penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, serta perhitungan ukuran pemusatan data seperti *mean*, *median*, *modus*, *standar deviasi*, maupun *persentase*. Sementara itu, analisis multivariat digunakan untuk menemukan pola antarvariabel dan mengelompokkan wilayah dengan karakteristik yang mirip.

2.2.1 Klasterisasi untuk Pemetaan Produktivitas Padi

Analisis klaster merupakan salah satu teknik dalam analisis multivariat yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek ke dalam klaster berdasarkan kemiripan karakteristik. Dalam konteks kajian ini, objek yang dimaksud adalah 38 provinsi di Indonesia yang dibandingkan berdasarkan produktivitas padi (kuintal/hektare) dan luas panen (ha). Klaster yang baik adalah klaster yang mempunyai homogenitas (kesamaan) yang tinggi antar anggota dalam satu klaster

dan mempunyai heterogenitas (perbedaan) yang tinggi antar klaster yang satu dengan yang lainnya.

Terdapat dua metode dalam analisis klaster, yaitu hierarki dan non-hierarki. Pada metode hierarki, klaster terbentuk secara bertahap dan hasilnya divisualisasikan dalam bentuk dendogram sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan antarobjek. Namun, metode ini kurang efisien apabila digunakan pada objek dengan jumlah yang besar. Sebaliknya, pada metode non-hierarki, klaster terbentuk secara langsung sejak awal karena jumlah klaster harus ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti menggunakan metode yang sesuai. Keunggulannya, metode ini lebih fleksibel dan mampu diterapkan pada objek berukuran besar.

Dalam kajian ini, digunakan analisis klaster non-hierarki dengan pendekatan K-Means yang mengelompokkan objek secara iteratif (berulang) ke dalam sejumlah klaster berdasarkan kemiripan karakteristik. Penentuan jumlah klaster optimal dilakukan dengan metode evaluasi seperti elbow dan/atau *silhouette* sehingga hasil yang diperoleh lebih objektif. Meskipun jumlah objek dalam penelitian ini relatif kecil, metode K-Means tetap relevan digunakan karena mampu memberikan gambaran pengelompokan yang jelas.

Langkah-langkah Analisis

Untuk memperoleh hasil pengelompokan yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik, dilakukan serangkaian tahapan analisis yang bersifat sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

1) Input Data

Tahap awal diawali dengan proses *input* data, kemudian dilakukan identifikasi untuk menentukan variabel yang digunakan dalam proses pengelompokan, serta pemeriksaan *missing value* (data hilang).

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Dalam melakukan analisis klasterisasi, perlu dipastikan bahwa antar variabel independen tidak terdapat hubungan linier kuat (multikolinieritas) yang dapat memengaruhi keakuratan hasil klaster. Pengujian dilakukan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan rumus sebagai berikut:

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R^2_j} \quad (1)$$

Dengan,

VIF_j : *VIF untuk variabel bebas ke – j*

R^2_j : *Koefisien determinasi X_j*

Nilai VIF > 10 menunjukkan adanya indikasi multikolinieritas yang tinggi dan perlu dikaji ulang variabelnya.

3) Menghitung Jarak Antar Objek

Klusterisasi *K-Means* bekerja berdasarkan ukuran kedekatan antar objek. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan jarak antarobservasi menggunakan *Euclidean Distance* dengan rumus sebagai berikut:

$$d_{ij} = \left[\sum_{i=1}^p (X_{ik} - X_{jk})^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

Dengan,

- d_{ij} : Jarak antara objek ke $-i$ dan objek ke $-j$
 X_{ik} : Jarak antara objek ke $-i$ pada variabel ke $-k$
 X_{jk} : Jarak antara objek ke $-j$ pada variabel ke $-k$
 p : Banyak Variabel

4) Menentukan Jumlah Klaster dengan Metode *Silhouette*

Metode *Silhouette* merupakan teknik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas hasil pengelompokan dalam analisis klaster. Ukuran ini memberikan penilaian terhadap seberapa baik suatu objek berada dalam klaster yang dipilih dibandingkan dengan klaster lainnya. Rumusan yang digunakan untuk menghitung jumlah klaster menggunakan Metode *Silhouette* adalah sebagai berikut:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}} \quad (3)$$

Dengan,

$s(i)$: *Nilai Silhouette untuk objek ke- i*

$a(i)$: *Jarak rata-rata antara objek i dengan seluruh objek dalam klasternya sendiri*

$b(i)$: *Jarak rata-rata terkecil antara objek i dengan semua objek di klaster lain yang paling dekat*

Nilai $s(i)$ mendekati 1 menunjukkan bahwa objek sangat sesuai dengan klasternya dan jauh dari klaster lain, nilai $s(i)$ mendekati 0 menunjukkan bahwa objek berada di batas antara dua klaster, dan nilai $s(i)$ yang negatif mengindikasikan bahwa objek tersebut lebih dekat ke klaster lain dibanding klasternya sendiri sehingga kemungkinan besar terjadi salah pengelompokan.

5) Membentuk klaster dengan metode *K-Means*

Setelah jumlah klaster optimal ditentukan melalui metode *Silhouette*, tahap selanjutnya adalah membentuk klaster menggunakan algoritma *K-Means*. Metode ini bekerja secara iteratif dengan mengelompokkan objek berdasarkan kedekatannya terhadap pusat klaster (*centroid*). Dalam kajian ini, proses klasterisasi dilakukan menggunakan perangkat lunak *R* dengan fungsi *kmeans()*.

6) Menginterpretasikan hasil pengklasteran dengan metode non-hierarki

2.2.2 Tingkat Pemenuhan Cadangan Pangan

Analisis tingkat pemenuhan cadangan pangan dilakukan dengan membandingkan data cadangan pangan aktual dan cadangan pangan seharusnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat Pemenuhan} = \left(\frac{\text{Cadangan Aktual}}{\text{Cadangan Seharusnya}} \right) \times 100\% \quad (4)$$

Analisis ini dilakukan secara tahunan untuk periode 2021 hingga 2024 untuk melihat tren perkembangan capaian cadangan pangan rumah tangga dan mengevaluasi apakah selama periode tersebut terjadi peningkatan signifikan dalam pengelolaan cadangan pangan, baik dari sisi ketersediaan maupun kecukupan terhadap standar yang ditetapkan.

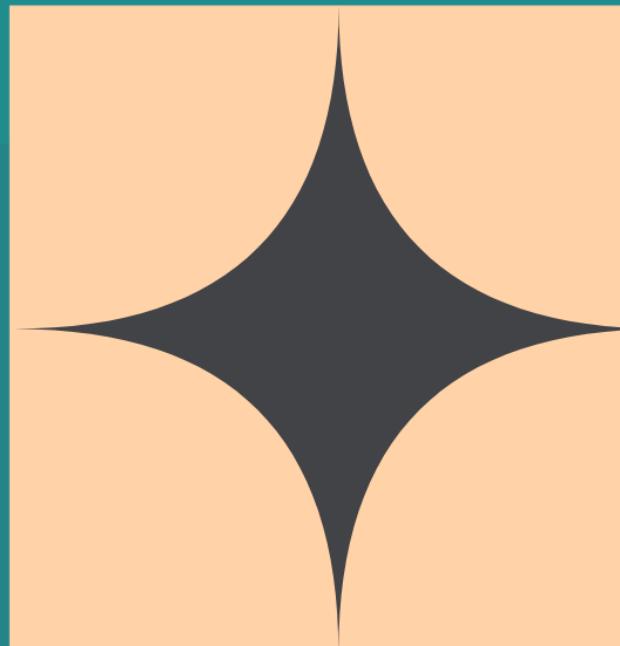
2.2.3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) menggambarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka pola konsumsi pangan masyarakat telah sesuai dengan komposisi ideal gizi seimbang. Analisis dilakukan dengan mengambil data skor PPH Kabupaten Bandung dari tahun 2019-2024 lalu membandingkan skor dengan rata-rata provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, serta menganalisis tren peningkatan atau stagnasi skor. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah peningkatan cadangan dan produksi pangan berdampak langsung pada perbaikan pola konsumsi masyarakat.

BAB III

HASIL DAN

PEMBAHASAN



3.1. Pendahuluan

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap tiga indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bandung, yaitu produktivitas padi (ketersediaan), tingkat pemenuhan cadangan pangan (pemanfaatan), dan Pola Pangan Harapan (PPH) (keterjangkauan). Analisis dilakukan dengan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan penyajian hasil dilakukan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2024 berdasarkan tiga indikator tersebut.

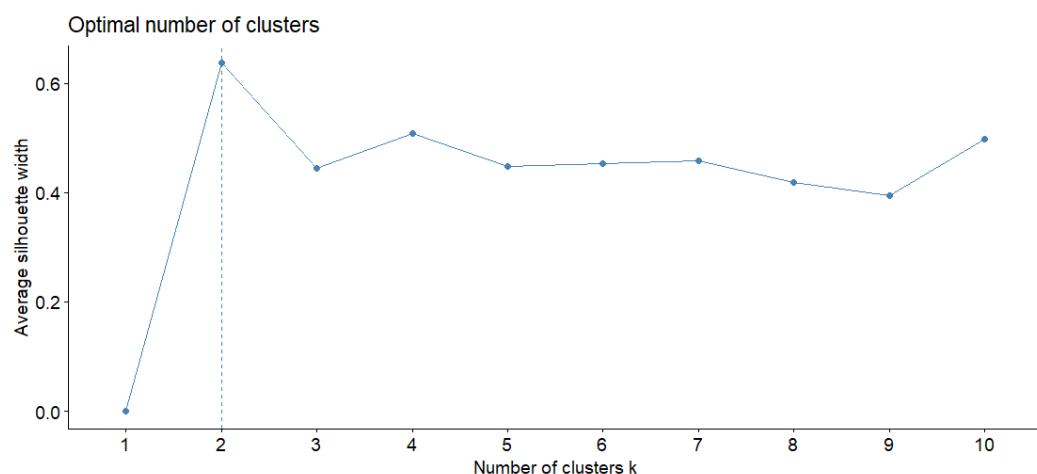
3.2. Hasil Klasterisasi Produktivitas Padi

Analisis klaster dilakukan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan dua variabel utama, yaitu produktivitas padi (kuintal/hektare) dan luas panen (hektare). Kedua variabel ini memiliki skala pengukuran yang berbeda sehingga untuk menghindari dominasi salah satu variabel dalam penghitungan jarak maka dilakukan standardisasi data menggunakan fungsi *scale()* di *R*. Dengan demikian, data harus distandardisasi terlebih dahulu karena memiliki nilai atau jarak yang berbeda.

Sebelum dilakukan klasterisasi, dilakukan pula pengujian asumsi non-multikolinearitas untuk memastikan bahwa kedua variabel yang digunakan tidak memiliki korelasi yang sangat tinggi. Pengujian dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil menunjukkan bahwa nilai VIF untuk kedua

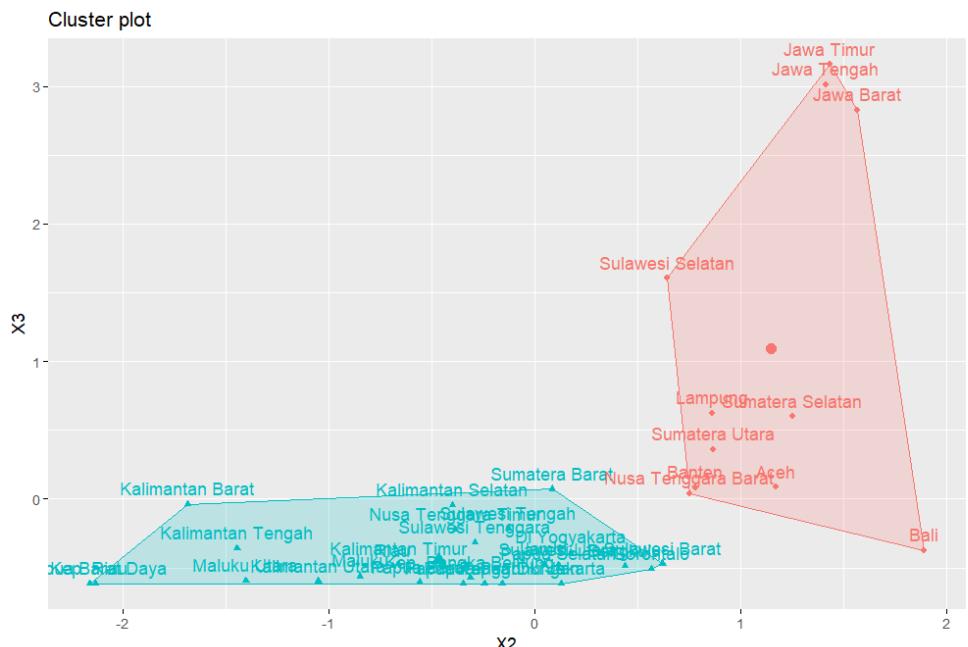
variabel berada di bawah ambang batas 10, yaitu 1.5 sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang dapat mengganggu proses klasterisasi.

Selanjutnya, dilakukan penentuan jumlah klaster optimal menggunakan metode *Silhouette* seperti pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Jumlah Klaster Optimal menggunakan metode *Silhouette*

Berdasarkan **Gambar 1**, terlihat bahwa nilai koefisien tertinggi dicapai pada $k = 2$. Hal ini menunjukkan bahwa dua klaster sudah memadai untuk menggambarkan pola utama dalam data. Hasil pengolokpokan menunjukkan bahwa Klaster 1 beranggotakan 11 provinsi, sementara Klaster 2 mencakup 27 provinsi dengan visualisasi seperti pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Visualisasi Hasil Klasterisasi menggunakan K-Means

Visualisasi klaster pada **Gambar 1.2** menunjukkan persebaran provinsi dalam dua kelompok berdasarkan dua dimensi utama, yaitu produktivitas dan luas panen. Provinsi-provinsi yang tergolong dalam Klaster 1 (ditandai dengan warna merah) cenderung memiliki nilai produktivitas dan luas panen yang lebih tinggi, sedangkan Klaster 2 (ditandai dengan warna merah) terdiri dari provinsi dengan produktivitas dan luas panen yang lebih rendah. Berikut merupakan rincian Provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam tiap-tiap klasternya:

- **Klaster 1:** Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh.
- **Klaster 2:** Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, DI

Yogyakarta, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Utara, Riau, Bengkulu, Papua Selatan, Gorontalo, Maluku, Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Kep.Riau, dan Papua Pegunungan.

Berdasarkan hasil klasterisasi yang divisualisasikan pada **Gambar 2**, Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam Klaster 1, yaitu kelompok provinsi dengan produktivitas dan luas panen padi yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Posisi Jawa Barat dalam *plot* terlihat berada di bagian atas area klaster, berdekatan dengan provinsi besar lainnya seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa Jawa Barat memiliki karakteristik agrikultur yang kuat dan sejajar dengan sentra-sentra utama produksi padi nasional.

Berdasarkan capaian tahun 2024, Kabupaten Bandung berhasil meraih penghargaan sebagai *“Kabupaten/Kota dengan Produktivitas Padi Tertinggi di Jawa Barat.”* Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat, Kabupaten Bandung berada pada peringkat ke-11 dalam produksi padi dan peringkat ke-2 dalam produktivitas. Meski Kota Bandung menempati posisi pertama dalam hal produktivitas, luas panennya yang relatif kecil (hanya 968 hektare) membuat kontribusinya terhadap produksi skala besar kurang representatif. Oleh karena itu, penghargaan produktivitas tertinggi diberikan kepada Kabupaten Bandung yang memiliki capaian produktivitas tinggi sekaligus didukung oleh luas panen yang lebih signifikan. Capaian tersebut memperkuat posisi strategis Kabupaten Bandung dalam menjaga stabilitas pasokan pangan khususnya padi, baik di tingkat

lokal maupun regional. Dengan keunggulan ini, diharapkan Kabupaten Bandung dapat memainkan peran lebih aktif dalam menopang kebutuhan pangan Provinsi Jawa Barat serta kawasan sekitarnya.

3.3. Tinjauan Tingkat Pemenuhan Cadangan Pangan

Cadangan pangan memiliki peran penting dalam mengantisipasi berbagai risiko, seperti fluktuasi produksi, bencana alam, hingga gangguan distribusi. Oleh karena itu, analisis terhadap tingkat pemenuhan cadangan pangan menjadi aspek krusial setelah melihat capaian produktivitas. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, volume cadangan pangan di Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari hanya 177,61 ton pada tahun 2021, meningkat menjadi 1.069,18 ton pada tahun 2024 seperti yang terlihat pada **Tabel 2**.

Meskipun volume cadangan pangan aktual mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian ini masih berada di bawah target ideal sebesar 1.758,86 ton dengan tingkat pemenuhannya baru mencapai 60,8% pada tahun 2024. Berikut merupakan rincian lebih lanjut mengenai perkembangan capaian cadangan pangan Kabupaten Bandung selama periode 2021 hingga 2024.

Tabel 5. Tingkat Pemenuhan Cadangan Pangan Kabupaten Bandung

Tahun	Tingkat Pemenuhan Cadangan Pangan
2021	12,5%
2022	25,8%
2023	56,7%
2024	60,8%

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan cadangan pangan Kabupaten Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2021 hingga 2024. Meskipun capaian tahun 2024 belum mencapai target cadangan seharusnya, Kabupaten Bandung memperoleh pengakuan nasional dalam pengelolaan cadangan pangan melalui penghargaan sebagai *“Juara 1 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tingkat nasional pada November 2024”*. Hal ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam aspek tata kelola dan efektivitas kebijakan.

Kabupaten Bandung menunjukkan capaian positif dalam aspek ketersediaan yang ditunjukkan oleh produksi padi dan aspek keterjangkauan yang ditunjukkan oleh pengelolaan cadangan pangan. Meskipun demikian, ketahanan pangan yang utuh tidak hanya ditentukan oleh jumlah, tetapi juga oleh kualitas dan keberagaman konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, analisis selanjutnya akan difokuskan pada Pola Pangan Harapan (PPH) untuk melihat keseimbangan dan keragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Bandung.

3.4. Tinjauan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Peningkatan cadangan pangan belum sepenuhnya diikuti oleh keragaman konsumsi pangan masyarakat. Dalam enam tahun terakhir, skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bandung menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung stagnan, sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 4**.

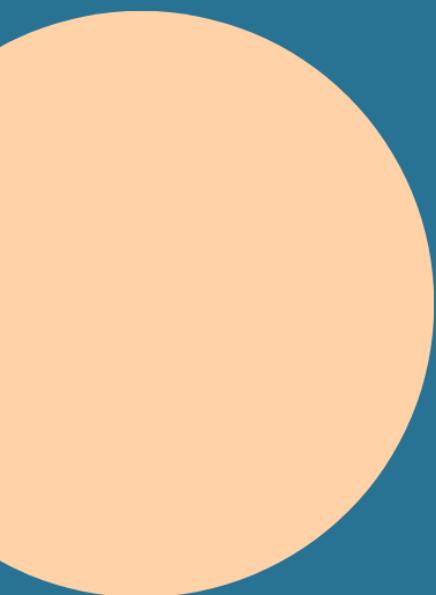
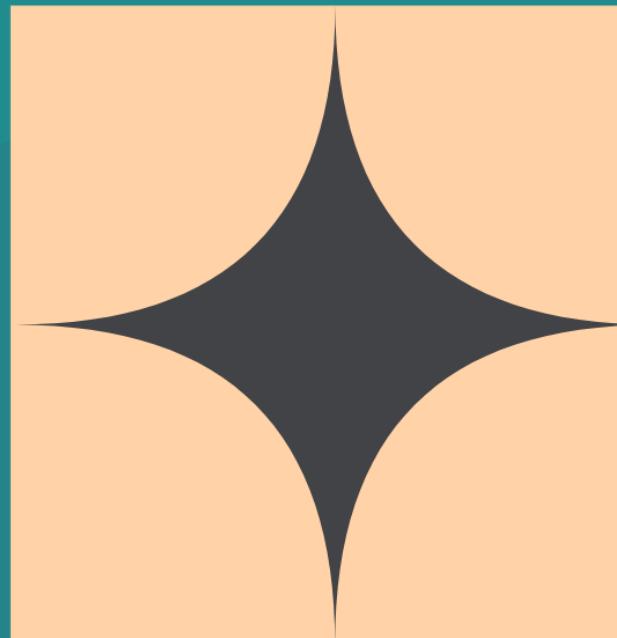


Pada tahun 2024, Skor PPH Kabupaten Bandung tercatat sebesar 81,1, berada di bawah rata-rata provinsi Jawa Barat yang mencapai 91,2. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan ketersediaan pangan belum sepenuhnya berdampak pada keanekaragaman konsumsi sehingga diperlukan intervensi lebih lanjut untuk mendorong pola konsumsi pangan yang lebih beragam dan mencakup berbagai kelompok pangan, seperti sumber protein hewani, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan.

BAB IV

SIMPULAN DAN

REKOMENDASI



Ketahanan pangan merupakan konsep yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan sebagaimana diadopsi dari kerangka Indeks Ketahanan Pangan Badan Pangan Nasional (2022). Berdasarkan hasil kajian, Kabupaten Bandung menunjukkan capaian yang menonjol pada aspek ketersediaan pangan, khususnya melalui produktivitas padi yang tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2024. Selain itu, cadangan pangan Kabupaten Bandung juga menunjukkan peningkatan signifikan dari hanya 177,61 ton pada 2021 menjadi 1.069,18 ton pada 2024.

Meskipun tingkat pemenuhan cadangan pangan baru mencapai 60,8% dari target ideal, tata kelola dan strategi pengelolaan yang diterapkan telah mendapat pengakuan nasional. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan Juara 1 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tingkat nasional yang diraih Kabupaten Bandung pada November 2024. Capaian ini mencerminkan bahwa Kabupaten Bandung telah menunjukkan praktik tata kelola yang efektif meski dalam kondisi sumber daya yang masih terbatas.

Di sisi lain, pada pilar pemanfaatan yang direpresentasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Kabupaten Bandung mencatat skor sebesar 81,1 pada tahun 2024. Nilai ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (91,2) yang menunjukkan bahwa keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Sementara itu, aspek pendukung lainnya belum dibahas pada bagian ini, namun tetap menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan pangan secara utuh.



Dengan demikian, keunggulan dalam produksi dan pengelolaan cadangan pangan menjadi kekuatan utama Kabupaten Bandung khususnya pada pilar ketersediaan dan keterjangkauan. Namun, untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan secara menyeluruh, aspek pemanfaatan terutama dalam hal konsumsi dan keberagaman pangan masih perlu dilakukan intervensi dan penguatan di masa mendatang.